



## JURNAL PROAKSI

Journal homepage: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>



### PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Nada Salsabila Ramadhani<sup>1</sup>,

Anik Yuliati<sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : nsalsabila958@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

\*Corresponden Author Email : anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id

**Diterima** : 11 November 2021    **Direvisi** : 23 November 2021    **Dipublikasikan** : 30 Desember 2021

#### *Abstract*

*The implementation of village development can run well with village funds provided by the central government through the village government and managed by village officials who handle village funds. The use of Village Fund Allocation is prioritized to finance community development and empowerment. However, currently there are still some management of village fund allocations that are not optimal, indicated by the abuse of power by village officials, then by the lack of openness from village officials, and the lack of community aspirations in planning the management of village fund allocations. This study aims to examine the effect of accountability, transparency, and social participation on the management of village fund allocations in villages in Kalitidu District, Bojonegoro Regency. The subjects of this research are village officials who directly manage the allocation of village funds. The method of determining the sample using purposive sampling technique, in order to obtain a sample of 72 village officials. Data were collected through a questionnaire. Data were analyzed using SEM PLS with WarpPLS 7.0 software program. The results of the study prove that accountability, transparency, and social participation have a positive and significant impact on the management of village fund allocations..*

**Keywords:** *accountability, transparency, participation, village fund.*

#### PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah otonom dengan adat dan tradisi serta kebudayaan yang kental. Setiap desa pasti melaksanakan pembangunan berencana setiap tahunnya, agar terciptanya kondisi yang sejahtera dan berkualitas bagi masyarakat. Pembangunan Desa pada dasarnya adalah untuk mengelola sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah desa itu sendiri, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal tersebut guna mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta pengelolaan sumber daya secara profesional agar dapat meningkatkan perekonomian desa.

Banyak fasilitas desa yang harus diperbaiki dan ditinjau setiap tahunnya seperti jalan desa, gorong-gorong, biaya pendidikan, biaya imunisasi balita, dan lain-lain. Dengan kebutuhan yang meningkat, pemerintah terus menaikkan jumlah alokasi RAPBN dan RAPBD untuk daerah dan desa melalui alokasi dana desa. Dari kenaikan RAPBN dan RAPBD maka mempengaruhi jumlah dana desa yang diterima. Dari semakin bertambahnya alokasi dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan potensi adanya kesalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya, apabila tidak diawasi dengan baik dan pengelolaan berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan program pemerintah desa yang selaras dengan tujuan, maka dituntut adanya

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Transparansi menjamin semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa. (Umami & Nurodin, 2017).

Selain dengan adanya transparansi dalam menunjang berjalannya pengelolaan alokasi dana desa dengan baik terdapat juga akuntabilitas. Pemerintah daerah memiliki peranan dalam memperhatikan mengenai kapabilitas pengelola keuangan desa dengan memberikan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan secara detail dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. (Umaira & Adnan, 2019). Pengelolaan alokasi Dana Desa yang transparan serta akuntabel memberikan dampak yang positif untuk pemerintahan desa, dengan menerapkan asas transparan dan akuntabel akan menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan tentunya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat juga merupakan penunjang adanya pengelolaan alokasi dana desa dengan baik selain dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan alokasi dana desa juga harus dengan partisipasi masyarakat di dalamnya. Pembangunan Desa mewujudkan adanya kemandirian suatu desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib dikelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan di desa secara berkelanjutan. Agar desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan dari adanya pengelolaan sumber daya.

Dengan jumlah alokasi dana desa yang mengalami peningkatan, tentu saja dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan seperti penyelewengan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Peran masyarakat dalam hal ini juga penting untuk membantu kepala desa dalam menyampaikan berbagai aspirasi serta saran dari masyarakat atas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Bupati Bojonegoro dalam [beritabojonegoro.com](http://beritabojonegoro.com), berdasarkan data Pemkab Bojonegoro, masih ditemukan beberapa keuangan desa yang sistem perencanaannya belum matang. Pada tahun 2018 juga Bojonegoro mendapati kasus penyelewengan alokasi dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa tersebut. Dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi bahwa pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa banyak yang tidak berjalan secara lancar karena banyak dari pemerintah desa sering mengabaikan ketiga prinsip, yakni akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dan dalam penerapannya tidak berjalan secara bersamaan.

Berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus, 2019) berkesimpulan bahwa Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Alpendra et al., 2020) berkesimpulan bahwa Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh sebuah organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media yang telah disediakan dan dilaksanakan secara periodik. Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang berwenang dalam memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang telah menjadi

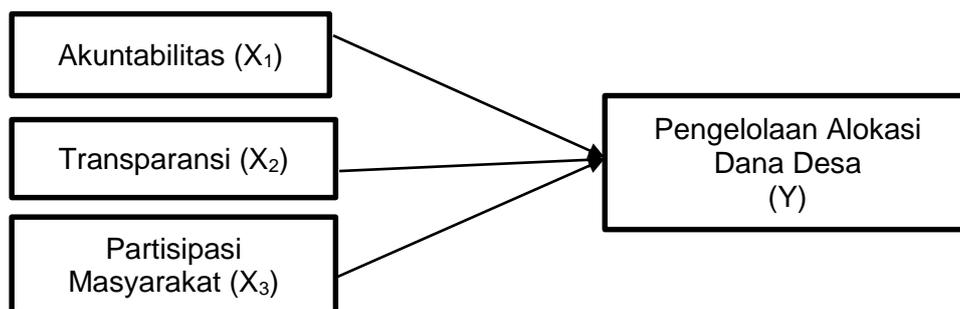
tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Tujuan akuntabilitas publik sesungguhnya adalah untuk menjamin demokratisasi tegaknya hukum dan keadilan serta tercapainya keadilan dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif, produktif dan inovatif serta efisien. (Tama & Wirama, 2020)

Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat bisa memperoleh informasi secara mudah dan seluas-luasnya. Transparansi merupakan sebuah pelayanan publik yang sifatnya terbuka serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan yang disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Mahmudi, 2015). Asas transparansi menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa (Bawono, 2019:105).

Tingkat partisipasi masyarakat juga mempunyai pengaruh dalam pengelolaan alokasi dana desa, Partisipasi masyarakat sendiri merupakan bentuk keikutsertaan atau antusiasme masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi sumber daya yang ada, khususnya dalam hal ini adalah pengelolaan alokasi dana desa. Partisipasi dapat dikategorikan dengan kalimat “turut ambil bagian” berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi atau menampung aspirasi masyarakat (Ihyaul, 2004:31).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didalamnya memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan adalah tugas dari pemerintahan desa, termasuk juga dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dikelola langsung untuk pembangunan desa, seperti perbaikan fasilitas desa, biaya pendidikan, biaya kesehatan masyarakat desa, dsb. Tahap pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Diagram kerangka pikir teoritis

Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dengan adanya sikap akuntabilitas dari aparat yang berwenang maka bisa dikatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan (Khasanah, 2019) bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya pengelolaan alokasi dana desa akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas dilaksanakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola alokasi dana desa.

### H<sub>1</sub>: Bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

### Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi menunjukkan bahwa pemerintah desa bersifat terbuka dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Menurut penelitian yang dilakukan (Agustiana, 2020) bahwa tingkat transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya dengan adanya sikap keterbukaan pemerintah atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Adanya sikap transparansi pemerintah desa dalam informasi terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya dan juga meminimalisir adanya penyimpangan tindakan oleh aparat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

### **H<sub>2</sub>: Bahwa Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa**

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi bisa mewujudkan tatanan desa yang demokratis dan berjalan sesuai dengan tujuan, dengan partisipasi masyarakat juga mampu meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Tata kelola desa yang dinamis antara pemerintah desa dan masyarakat, desa mampu menyelenggarakan pembangunan desa secara berkala untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut penelitian yang dilakukan (Firdaus, 2019) bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan alokasi dana desa menjadi terarah dan lebih baik karena masyarakat ikut serta aktif mengarahkan program kegiatan dan pencapaian sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

### **H<sub>3</sub>: Bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Objek Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Objek penelitian yang akan digunakan adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat.

### **Populasi dan Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 254 orang. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive* dengan kriteria Perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu dan mengelola secara langsung alokasi dana desa. Dalam menentukan sampel dapat menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2018:137):

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan, N = Jumlah Populasi, e = Tingkat kesalahan sampel atau *sampling error* (10%)

$$n = \frac{254}{1 + 254(0,1)^2} = \frac{254}{1 + 2,54} = \frac{254}{3,54} = 71,75 = 72 \text{ sampel (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 72 Responden dengan rincian 4 orang perangkat desa di 18 desa kecamatan kalitidu yang memenuhi kriteria sebagai sampel, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala BPD.

### **Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu Perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah 72 responden. Data dikumpulkan dengan metode angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2018:262) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Indikator pengukuran variabel pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wirahati (2020). Kuesioner ini disebar oleh peneliti secara *offline*, kemudian Perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu mengisi kuesioner.

### Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan software WarpPLS 7.0. Metode analisis *Structural Equation Model* (SEM) terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model* (Abdillah, W., & Hartono, 2015).

### Uji Hipotesis

Hipotesis statistik untuk outer model adalah:

H0:  $\lambda_i = 0$  = Indikator yang digunakan dapat memprediksi variabel laten.

H0:  $\lambda_i \neq 0$  = Indikator yang digunakan tidak dapat memprediksi variabel laten

Hipotesis statistik untuk inner model:

a. Hipotesis 1

H0:  $\lambda_i = 0$  = Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

H0:  $\lambda_i \neq 0$  = Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

b. Hipotesis 2

H0:  $\lambda_i = 0$  = Terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

H0:  $\lambda_i \neq 0$  = Tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa..

c. Hipotesis 3

H0:  $\lambda_i = 0$  = Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

H0:  $\lambda_i \neq 0$  = Tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Hasil Penelitian

#### Gambaran Umum Keadaan Responden

Pada penelitian ini peneliti telah menyebarkan kuesioner, kemudian Perangkat Desa di Kecamatan Kalitidu mengisi kuesioner, hingga kuesioner tersebut diisi oleh 72 responden sesuai karakteristik yang telah ditentukan. Karakteristik dalam penelitian ini yaitu: responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 44 responden dan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 28 responden. Responden dengan karakteristik jabatan yang mengelola alokasi dana desa memiliki jumlah yang sama setiap desa yakni 4 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, dan Kepala BPD pada 18 desa di Kecamatan Kalitidu.

### Analisa Data

#### Model Pengukuran (*Outer Model*)

#### Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

*Rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen adalah *outer loading*  $> 0,7$ , dan untuk nilai AVE (*Average Variance Extracted*)  $> 0,5$  (Abdillah, W., & Hartono, 2015).

**Tabel 1.** Hasil *Outer Loading* Tahap 1

	Akuntabilitas (X2)	Transparansi (X3)	Partisipasi Masyarakat (X4)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)
X1.1	0.740			
X1.2	0.753			
X1.3	0.708			
X1.4	0.817			
X1.5	0.774			
X2.1		0.740		
X2.2		0.753		
X2.3		0.708		
X2.4		0.817		
X2.5		0.774		
X3.1			0.557	
X3.2			0.776	
X3.3			0.821	

X3.4	0.762	
X3.5	0.758	
Y.1		0.867
Y.2		0.888
Y.3		0.664
Y.4		0.705
Y.5		0.653

Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan tabel *outer loading* tahap pertama terdapat 3 indikator yang berwarna merah mempunyai nilai *loading* dibawah 0,70. Hal tersebut menandakan bahwa indikator tersebut harus dihapus karena tidak sesuai dalam memenuhi kriteria batas minimum pengukuran. Dengan demikian dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan *outer loading* tahap kedua.

**Tabel 2.** Hasil *Outer Loading* tahap 2

	Akuntabilitas (X2)	Transparansi (X3)	Partisipasi Masyarakat (X4)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)
X1.1	0.740			
X1.2	0.753			
X1.3	0.708			
X1.4	0.817			
X1.5	0.774			
X2.1		0.730		
X2.2		0.769		
X2.3		0.819		
X2.4		0.755		
X2.5		0.729		
X3.2			0.819	
X3.3			0.853	
X3.4			0.806	
X3.5			0.690	
Y.1				0.905
Y.2				0.919
Y.4				0.734

Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan tabel *outer loading* tahap kedua masih terdapat 1 indikator yang berwarna merah mempunyai nilai *loading* dibawah 0,70. Dengan demikian dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan *outer loading* tahap ketiga.

**Tabel 3.** Hasil *Outer Loading* Tahap 3

	Akuntabilitas (X2)	Transparansi (X3)	Partisipasi Masyarakat (X4)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)
X1.1	0.740			
X1.2	0.753			
X1.3	0.708			
X1.4	0.817			
X1.5	0.774			
X2.1		0.730		
X2.2		0.769		
X2.3		0.819		
X2.4		0.755		
X2.5		0.729		
X3.2			0.838	

X3.3	0.880
X3.4	0.833
Y.1	0.905
Y.2	0.919
Y.4	0.734

Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan hasil *outer loading* tahap ketiga pada tabel dapat dilihat bahwa semua indikator valid setelah dilakukan eatimasi sebanyak 3 tahap. Indikator dapat dikatakan valid karena semua nilai *loading factor* berada diatas 0,70 sehingga konstruk untuk semua variabel tidak ada yang dieliminasi dari model.

**Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)**

**Tabel 5.** Hasil Pegujian Validitas Diskriminan

	Loading		X1	X2	X3	Y
X1.1	0.740	>		-0.043	-0.129	0.044
X1.2	0.753	>		0.055	0.081	-0.199
X1.3	0.708	>		0.093	0.092	-0.152
X1.4	0.817	>		-0.194	-0.143	0.261
X1.5	0.774	>		0.108	0.111	0.015
X2.1	0.730	>	-0.290		0.318	0.110
X2.2	0.769	>	0.019		0.004	-0.126
X2.3	0.819	>	0.046		-0.178	0.039
X2.4	0.755	>	0.190		-0.139	-0.182
X2.5	0.729	>	0.022		0.021	0.169
X3.2	0.838	>	-0.034	0.091		0.077
X3.3	0.880	>	0.102	-0.116		0.021
X3.4	0.833	>	-0.073	0.031		-0.099
Y.1	0.905	>	0.092	-0.028	-0.028	
Y.2	0.919	>	-0.014	0.027	-0.020	
Y.4	0.734	>	-0.096	0.000	0.060	

Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan tabel 5 telah menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Variabel Akuntabilitas memiliki 5 indikator yakni X1.1 sampai dengan X1.5 yang nilai loadingnya lebih besar daripada nilai loading ke konstruk lain, variabel transparansi memiliki 5 indikator yakni X2.1 sampai dengan X2.5 yang nilai loadingnya lebih besar daripada nilai loading ke konstruk lain, lalu variabel partisipasi masyarakat memiliki 3 indikator yakni X2.2 smpai dengan X2.4 yang nilai loadingnya lebih besar daripada nilai loading ke konstruk lain, dan variabel pengelolaan alokasi dana desa yang memiliki 3 indikator yakni Y.1, Y.2, dan Y.4 yang nilai loadingnya lebih besar daripada nilai loading ke konstruk lain.

**Composite Reability**

**Tabel 6.** *Composite Reliability Coefficient dan Cronbach's Alpha Coefficient*

	X1	X2	X3	Y	Kriteria	Keterangan
Composite Reliability	0.872	0.873	0.887	0.891	> 0,7	Reliable
Cronbach's Alpha	0.816	0.818	0.809	0.814	> 0,6	Reliable

Sumber: Output WarpPLS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai *Composite Reliability* untuk setiap variabel X1, X2, X3, dan Y adalah sebesar 0.872, 0.873, 0.887, dan 0.891. Sedangkan untuk *Cronbach's Alpha* setiap variabel dinilai dari X1, X2,X3 dan Y adalah sebesar 0.816, 0.818, 0.809, dan 0.809. Berdasarkan

hasil dari Composite Reliability dan Cronbach's Alpha, menunjukkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi syarat kriteria uji reliabilitas.

**Model Struktural (Inner Model)**

Berikut ini adalah hasil *output* model fit dan *quality indices* yang disajikan dalam tabel yaitu:

**Tabel 7.** Hasil Output Model Fit

	Indeks	P-value	Kriteria	Keterangan
APC	0,325	0,001	P < 0,05	Diterima
ARS	0,515	0,001	P < 0,05	Diterima
AVIF	1,516 <i>Good if &lt; 5</i>		AVIF < 5	Diterima

Sumber: Output WarpPLS

Berdasarkan hasil output tersebut diketahui bahwa nilai APC memiliki indeks sebesar 0,325 dengan *p-value* < 0,001, sedangkan nilai ARS memiliki indeks sebesar 0,515 dengan *p-value* < 0,001, dilihat dari kriteria APC dan ARS sudah memenuhi kriteria karena memiliki *p* < 0,001. Dan untuk nilai AVIF yang harusnya < 5 sudah terpenuhi karena berdasarkan data tersebut AVIF nilainya 1,516.

**Tabel 8.** R-Square

	X1	X2	X3	X4	Y
R-Squared					0,515

Sumber: Output WarpPLS

Evaluasi model struktural pada R<sup>2</sup>, Nilai R-square variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 0,515. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 51,5%.

**Uji Hipotesis**

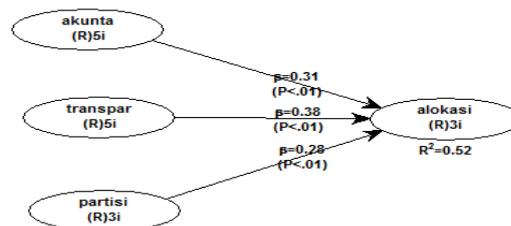
Berikut ini adalah tabel hasil penelitian dari *effect size* yang telah diperoleh dari pengolahan data :

**Tabel 9.** Path Coefficient, *p* – values, dan Effect sizes for path

Kriteria	Variabel	X1	X2	X3	Y
Path Coefficients	X1	-	-	-	-
	X2	-	-	-	-
	X3	-	-	-	-
	Y	<b>0,311</b>	<b>0,385</b>	<b>0,280</b>	-
P-values	X1	-	-	-	-
	X2	-	-	-	-
	X3	-	-	-	-
	Y	<b>0,002</b>	<b>&lt;0,001</b>	<b>0,006</b>	-
Effect sizes for path	X1	-	-	-	-
	X2	-	-	-	-
	X3	-	-	-	-
	Y	<b>0,167</b>	<b>0,204</b>	<b>0,144</b>	-

Sumber: Output WarpPLS

Berikut adalah gambar dari hasil penelitian dari *effect size* yang telah diperoleh dari pengolahan data :



**Gambar 2.** Hasil penelitian  
Sumber: Output WarpPLS

Berdasarkan hasil diatas, maka uraian pengujian hipotesis sebagai berikut:

**a. Pengujian Hipotesis (H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa)**

H<sub>1</sub> menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan nilai *p-value* sebesar 0,002 yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana *p-value*  $\leq 0,05$  diterima. Dan dari nilai *path Coefficients* sebesar 0,31 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka akuntabilitas meningkat sebesar 0,31 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima karena variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

**b. Pengujian Hipotesis (H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa)**

H<sub>2</sub> menyatakan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan nilai *p-value* sebesar  $< 0.001$  yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana *p-value*  $\leq 0,05$  diterima. Dan dari nilai *Path Coefficients* sebesar 0,39 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka transparansi meningkat sebesar 0,41 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima karena variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

**c. Pengujian Hipotesis (H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa)**

H<sub>3</sub> menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan nilai *p-value* sebesar 0,006 yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana *p-value*  $\leq 0,05$  diterima. Dan dari nilai *Path Coefficients* sebesar 0,28 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka partisipasi masyarakat meningkat sebesar 0,28 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima karena variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian *inner model* dan *outer model*, diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Diterimanya hipotesis pertama memberikan makna bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas akan menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik apabila dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan dan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya, dimulai dari perencanaan dan penganggaran alokasi dana desa yang dilakukan oleh sekretaris desa dan bendahara desa, lalu ke tahap pelaporan yang akan dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota setempat, dan yang terakhir pada tahap pertanggungjawaban yang diwujudkan dengan SPJ (surat pertanggungjawaban) yang disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan oleh kecamatan. Pelaksanaan setiap tahap tersebut harus diwujudkan sehingga pengelolaan alokasi dana desa bisa mencapai hasil yang maksimal. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alpendra et al., (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian *inner model* dan *outer model*, diketahui bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Diterimanya hipotesis kedua memberikan makna bahwa semakin meningkatnya transparansi akan menjadikan pengelolaan alokasi dana desa juga berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku. Dalam tahapan pengelolaan alokasi dana desa terdapat tahap pelaksanaan yang sepenuhnya dilakukan oleh aparat desa yang berwenang mengelola, dalam perwujudan keterbukaan informasi maka setiap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa wajib dilengkapi dengan adanya keterbukaan informasi seperti pemasangan papan informasi kegiatan pada lokasi pembangunan dan informasi anggaran melalui media *online* web desa atau

kecamatan yang bersangkutan. Dengan adanya transparansi maka perwujudan tata pemerintah yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa dikatakan berhasil. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Garung & Ga (2020) dan penelitian yang dilakukan Agustiana (2020) transparansi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian *inner model* dan *outer model*, diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Diterimanya hipotesis ketiga memberikan makna bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat terhadap berjalannya program pemerintahan desa seperti pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya partisipatif dari masyarakat maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pelaksanaan kegiatan, karena masyarakat telah ikut berpartisipasi dan memberikan aspirasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019) dan Angelia & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa Partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan menjadi terarah dan menjadi lebih baik karena masyarakat ikut serta aktif mengarahkan program kegiatan dan pencapaian sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian *outer model* dan *inner model* menggunakan software WarpPLS 7.0 dengan pembahasan tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil *path coefficient* dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menunjukkan nilai positif yang mana menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sikap yang akuntabel, transparan, serta dengan partisipasi dari masyarakat akan meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa.

### **SARAN**

1. **Saran Praktis:** diharapkan pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola alokasi dana desa sebaiknya terus menerapkan dan meningkatkan indikator pengelolaan alokasi dana desa yang tersebut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni transparatif, akuntabel, dan partisipatif dengan meningkatkan rasa tanggungjawab untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan, lebih terbuka akan informasi kegiatan setiap periodenya dengan melampirkan pada media *online* seperti situs web kecamatan atau situs web desa masing-masing dan *offline* dengan memasang papan informasi yang tentunya dengan rincian anggaran terbaru, serta mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam perencanaan serta penganggaran dengan cara memberikan sosialisasi melalui Kepala BPD kepada perwakilan masyarakat seperti RT dan RW agar tercapainya proses pengelolaan yang sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik untuk menciptakan visi dan misi kecamatan kalitidu.
2. **Saran Teoritis:** diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat mengembangkan lagi dengan menambahkan atau menggunakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.

### **KETERBATASAN**

Peneliti telah melakukan penelitian ini secara optimal untuk mendukung tujuan penelitian, namun demikian peneliti merasa dalam hasil penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, Dalam pengumpulan data, banyaknya kantor kepala desa yang tidak beroperasi seperti jam kerja sebelumnya dikarenakan situasi pandemi, sehingga penulis harus mendatangi untuk kedua kali dan memakan waktu yang cukup lama. Adanya beberapa perbedaan persepsi antar responden dalam memahami konteks pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuesioner. Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuesioner sehingga dapat mempengaruhi jawaban responden yang memungkinkan jawaban tersebut tidak jujur.

## REFERENSI

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Struktural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (D. Prabant). Andi.
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 1–20.
- Alpendra, E., Sosial, F. I., Islam, U., Singingi, K., Nenas, K., Kuantan, T., & Singingi, K. K. (2020). *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, 2(2), 466–480.
- Angelia, S. R., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun .... *e-Proceeding of management*, 7(1), 1008–1014. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/11589>
- Bawono, I. R. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Firdaus, A. dan S. dan S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 1–10.
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Widyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526–539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ihyaul, U. (2004). *Akuntansi sektor publik: sebuah pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press.
- Khasanah, putri ismiatun. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP ALOKASI DANA DESA (Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompu). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ed.3 Cet.1 ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta (ed.); 1st ed.). Alfabeta.
- Surya Adi Tama, P., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p06>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi* (Vol. 6, Issue 50).
- Wirahati, J. (2020). *AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN* [Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur]. <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/1061>